

**Hendro Sangkoyo**

## **“Filantropi adalah cerita tentang hak...”**

Sumber:

Judul buku : Wacana Filantropi Dalam Kapitalisme Gerak Cepat

Ditulis ulang dari : Jurnal Galang, Vol.2 No.2 April 2007, PIRAC, 2007, Opini,  
Hal 66 – 70

*Filantropi dan kapitalisme merupakan dua hal berbeda dalam satu wacana. Beragam refleksi aktivitas filantropi mendapatkan beragam tanggapan kritis yang pada dasarnya menganggap bahwa filantropi adalah kepanjangan tangan dari kapitalisme. Berbagai program sosial, khususnya perusahaan yang memiliki andil terbesar, hanya dianggap sebagai “topeng” untuk menutupi kejahatan ekonomi, sosial, sekaligus lingkungan yang mereka lakukan. Pada edisi ini Galang berkesempatan mewawancarai Hendro Sangkoyo, lebih dikenal dengan panggilan Yoyok, yang saat ini sedang “bergerilya” di wilayah-wilayah terpencil guna melakukan penelitian berkenaan dengan krisis sosial ekologis di Indonesia.*

**Demokrasi, HAM, pluralisme adalah ajaran pokok Kapitalisme. Dan filantropi merupakan sisi putih Kapitalisme. Bagaimana pendapat Mas Yoyok mengenai hal tersebut?’**

Pertama saya tidak percaya bahwa demokrasi, HAM, dan pluralisme adalah ajaran pokok kapitalisme, atau bahwa kapitalisme itu punya ajaran pokok untuk menyantuni alam atau manusia. Di masa tumbuh awal kapitalisme industri, persoalan-persoalan utama dari demokrasi dan pengingkaran hak yang terjadi di London, misalnya, terjadi karena perluasan kapital pada waktu itu. Hal ini menyebabkan orang harus mengungsi dan menjadi buruh yang belum tentu lebih bagus prospeknya daripada menjadi petani. Begitu pula dengan apa yang berkembang sekarang di negara-negara selatan, yang mengenaskan wajah rakyatnya. Jadi dalam praktik sosialnya, kapitalisme adalah karikatur dari demokrasi dan pemenuhan hak. Dapat dibilang bahwa ciri khasnya di wilayah dan masa hidup kita kini mengacu pada *how to get away with murder*—itu terjadi dengan proses pengembangan kapitalisme khususnya sejak dekolonisasi negara-negara dunia ketiga. Apa hubungannya dengan anggapan bahwa kapitalisme mengajarkan demokrasi, HAM, dan pluralisme? Tidak ada. Tidak ada korelasi positif di antara keduanya. Mungkin dulu keduanya dianggap sebagai ujung tombak. Kita baca saja semua sejarah dari perusakan alam di Asia Tenggara bagian kepulauan, mulai dari Filipina sampai Indonesia—bagaimana hubungannya dengan perluasan sirkuit-sirkuit kapital di wilayah tersebut. Itulah kapitalisme yang nyata di dunia kita; pada masa hidup kita. Bahkan sudah lama, perlahan tetapi pasti perusakan itu semakin lama semakin membesar. Coba kita lihat perusakan itu atas nama apa. Apakah atas nama ideologi kerakyatan atau populisme? Tidak, bukan. Tetapi, perluasan modal yang didorong secara sistematis lewat kendali terhadap negara. Itu nomor satu. Kapitalisme mendorong perluasan ekonomik dengan manusia dan alam sebagai bagian utama dari instrumennya. Ada yang tidak dituturkan dengan baik dalam penglihatan “*tragedy of the commons*”, yaitu konteks pembesaran medan perusakan itu terjadi. Jadi saya kira itulah ciri pokoknya.

**Apa sasaran utama dari filantropisme? Apakah itu semacam ban pelampung supaya orang tidak tenggelam di tengah perusakan?**

Ada yang menganggap bahwa filantropi melunakkan wajah dari kerusakan yang terjadi, biaya-biaya sosial-ekologis dari perluasan ekonomi, rezim produksi yang mengabaikan prinsip keselamatan dan kelangsungan layanan alam. Sebagian lain menganggap filantropi

sebetulnya mau memperbaiki; mengubah yang dia rusak menjadi lebih bagus. Pendapat yang kedua ini saya sama sekali tidak yakin. Itulah sebabnya walaupun saya hormat dan merasa perlu, misalnya ada cerita filantropisme yang basisnya adalah sebuah model derma, sedekah, dan sebagainya. Tetapi kalau dikaitkan dengan cerita kapitalisme, malahan mendapatkan dimensi “*green-wash*” atau kalau mau ada warna redistributifnya walaupun sedikit, ya ada *social welfare* yang juga tidak selalu indah dalam praktik. Jika mau itung-itungan kerusakan sosial, mari kita bicara bersama. Misalnya, tentang buruh migran yang sebenarnya pengungsi, pengungsi dari gelombang ekspansi ekonomi di pedesaan. Karena tidak berhasil menciptakan lapangan kerja di desa, lalu tidak berhasil mengatasi krisis kelangkaan tanah, juga tidak berhasil mengatasi kerusakan ekologis, kemudian sebagai akibat logisnya, orang dipaksa atau terpaksa mengungsi.

Menurut saya, sebenarnya ada dua konsep filantropi: (1) kesukarelaan yang tidak bisa dituntut apa-apa dari pihak pemberi, (2) filantropi adalah cerita tentang hak, tentang peralihan sumber daya dari yang lebih kaya kepada mereka yang lebih miskin. Jadi diberi atau tidak, filantropi adalah hak kaum miskin. George Soros, misalnya, dia dikenal sebagai filantrop yang baik. Namun sebenarnya dia menyembunyikan wajah buruknya dalam aktivitas filantropi. Apa yang dia lakukan hanyalah memberikan secuil keuntungan bisnis yang dia peroleh. Kemudian dia menutupi pertualangan keuangannya melalui filantropi, walaupun filantropi sendiri kenyataannya belum tentu bisa memenuhi pemenuhan hak itu sendiri.

### **Bagaimana filantropi sosial mengatasi permasalahan sosial seperti itu?**

Saya tidak yakin Anda pun mempunyai jawaban yang pasti. Filantropi, mungkin melunakkan ya, membantu sedikit-sedikit ok, membuat sekolah di sana-sini bagus. Tetapi itu saja tidak cukup. Itulah sebabnya kalau kita bicara, misalnya, *corporate social responsibility*, ia tidak bisa menggantikan kerusakan sosial-ekologis yang diciptakan oleh perluasan kapital yang brutal seperti ini. Jika kemudian kita bicara, siapa yang salah? Dalam konteks ini, banyak yang salah. Misalnya, sektor publik, tidak ada satu ketentuan publik pun yang bisa menjerat pelaku pertumbuhan ekonomi untuk mengurus kerusakan sosial-ekologis yang ditimbulkannya secara partisipasi dan bisa dituntut. Kita mungkin mempunyai ratusan UU, bahkan mau membuat UU baru. Kenyataan di lapangan, mungkin ada 20 *mall* di Jakarta yang sebetulnya tidak pantas dibangun untuk urusan ekologisnya saja. Dari sisi penggunaan uang publik, sektor publik mensubsidi pembangunan *mall-mall*. Siapa yang mensubsidi kapitalisme? Rakyat, lewat model-model fasilitas yang makin lama makin permisif terhadap model-model perluasan kapital yang tidak ada hubungannya dengan produktivitas. Setelah krisis ekonomi Asia, misalnya, pembangunan *mall-mall* di Jakarta ini saya dengar—tapi saya belum melihat perhitungannya, sama sekali tidak bergantung pada kredit dari bank. dari mana dananya? Tidak jelas apakah dari *money laundering* atau sumber lain. Yang mau saya tekankan adalah jaman ini kalau kita mau bicara kapitalisme, bukan lagi bicara ideologinya tetapi bagaimana operasi kapital ini bergerak; bagaimana *aliran sumber dayanya*, sirkuit-sirkuitnya seperti apa.

Fungsi koordinasi dari *finance-capital* dipegang oleh kapital keuangan atau banking. Cerita *financial market*, *derivatives* dan sebagainya tidak ada hubungannya dengan produktivitas sosial/rakyat. Jadi dalam filantropi, ada filantropi yang geblek dan ada filantropi yang cerdas. Filantropi yang cerdas, misalnya, yang mendorong untuk produktivitas sosial, memperkuat infrastruktur rakyat supaya dia tidak bekerja 18 jam sehari, khususnya para perempuan sebagai subjeknya, dan jam kerja yang pendek, tapi sudah cukup untuk memenuhi kualitas hidupnya. Sedangkan filantropi yang *geblek* itu adalah, misalnya, kalau organisasi-organisasi partikelir / non-pemerintah berbondong-bondong untuk melaksanakan *community development* program dari perusahaan-perusahaan multinasional yang notabene tidak memberikan solusi apapun terhadap soal pertumbuhan tenaga kerja lokal, kerusakan alam, dan sebagainya. Saya dengar, misalnya Dompot Dhuafa banyak bikin kegiatan macam-macam. Saya yakin teman-teman yang lain juga melakukan hal yang sama, merawat komunitas masing-masing. Itu saja tetap tidak cukup karena krisisnya makin lama

makin dalam, kronis, dan makin luas. Jadi tidak bisa krisis yang mendalam ini, yang dimensinya itu sosial-ekologis, bukan ekologis saja atau sosial saja, mau diatasi dengan filantropi. Harus ada perombakan, pembaharuan dalam pengelolaan, produksi, konsumsi, tata guna sumberdaya publik, dan tata kuasanya. Jadi kalau kita menanyakan kembali, dimanakah letak filantropi? Bisa jadi kadang di sana, di sini. Filantropi memang baik, tetapi ia bukanlah bagian dari pemecahan persoalan. Filantropi tidak bisa mengatasi persoalan yang mendasar di masyarakat.

### **Bagaimana caranya meningkatkan kecerdasan dari dunia filantropi?**

Pertama, jangan sok tahu. Jadi kita baca dulu, apa sebenarnya duduk permasalahan masyarakat dalam lokasi tertentu. Apakah ini akan dijawab dengan filantropi atau dijawab dengan kerja keras mereka sendiri atau dengan perombakan dalam kebijakan fiskal. Jadi filantropi itu bukan tanpa batas. Kalau kita tidak menanyakan itu, filantropi bisa menjadi bagian dari perusakan. Misalnya, banyak wilayah-wilayah di Indonesia, di kepulauan dari dulu sampai sekarang terkenal dengan daerah miskin. Bahkan daerah-daerah penghasil hidrokarbon utama, seperti: Kalimantan Timur, Aceh, Riau, dan daerah-daerah lainnya penghasil minyak. Kemiskinan di wilayah-wilayah tersebut makin lama makin besar dan kronis. Pernah tidak semua lembaga filantropi mencoba membahas persoalan ini secara struktural? Jadi bahaya dari filantropi adalah menolak untuk membaca persoalan secara kultural, yang penting memberi sana sini. Misalnya, ada orang sakit kulit dan tidak sembuh-sembuh, kemudian hanya diberi salep. Ternyata dalamnya kanker. Jadi mengobatinya tidak mengena, itu bahaya-bahayanya. Secara umum orang beranggapan filantropi tidak jahat karena niatnya baik. Tapi pembicaraan begitu ada batasnya.

### **Sejauh mana filantropi dianggap tidak menguatkan sistem kapitalisme?**

Persoalan kapitalisme jangan dicampur aduk. Kapitalisme tidak dapat disederhanakan seperti dalam daftar pertanyaan. Ini kompleks, ia memiliki sisi baik dan sisi buruk. Secara keseluruhan kapitalisme mendorong untuk melakukan sebuah perusakan kreatif; kerusakan yang nanti dirusak lagi oleh ia sendiri, dan dirusak lagi supaya ia bisa bertahan hidup dan berkembang. Filantropi juga sebuah dunia yang tidak bisa dipukul rata. Misalnya, bagaimana kita menaruh cerita George Soros atau mungkin Bill Gates. Apakah betul dia merombak struktur dari peningkatan gap antara Negara Utara dan Selatan? Saya kira tidak demikian. Tetapi apakah para filantrop tersebut pelit? Saya yakin tidak. Tapi merusak ya, sekaligus berbuat baik. Jadi mengabdikan pada setan dan Tuhan sekaligus; pada iblis dan malaikat. Bagaimana kita bisa menjelaskan hal itu? Harus memilih salah satu.

### **Bagaimana kita sewajarnya menyikapi kondisi tersebut?**

Apakah kelompok filantropi pernah berdiskusi tentang bagaimana sebetulnya jerat-jerat dari bank dunia? Coba kita baca *polos* saja bahwa ini bagian dari ekonomi utang yang harus ditolak, dan dibatasi. Mereka bukan bosnya karena bos adalah orang yang punya urusan. Mungkin bisa saja filantropi tidak peduli mengenai hal itu. Itulah keterbatasannya.

Kemudian cerita berkenaan dengan apa yang dikenal sebagai *the fourth sector*. Mari kita jujur pada diri sendiri. Coba kita lihat sederhananya saja, seberapa jauh "sektor keempat" ini bisa dianggap sebagai pilar tersendiri? Cerita ini berkenaan dengan bagaimana sebetulnya *sustainability of production in capitalism* dalam konteks *financial capital* yang ada sekarang. Dia tidak mungkin tidak mengeluarkan dermanya dengan tujuan menghindari adanya resistensi. Masih banyak biaya-biaya yang masih dianggap sebagai eksternalitas. Misalnya, sekarang dia merumuskan kebijakan soal air. Siapa yang merumuskan? Pihak *corporate*. Siapa yang membiayai filantropi? Pihak *corporate* juga, dan sebagian lagi, rakyat sendiri yang iuran. Yang sekarang terlihat besar dan semakin membesar dengan cepat sekali adalah *corporate philanthropy*, paling tidak dalam 5 tahun terakhir. Jadi, bisa ke mana-mana ini, bisa ke kanan, bisa ke kiri.

## **Bagaimana peran masing-masing pihak, baik LSM, perusahaan, pemerintah, masyarakat?**

Bicara mengenai peran ornop, saya pikir ornop adalah jenis kolektivitas yang paling tergantung; sektor yang sangat tergantung. Saya pikir ornop tidak punya cukup syarat sebagai sebuah "sektor". Ornop adalah ekspresi derivatif dari sebuah mekanisme perantara; ini istilahnya adalah anak susu atau anak bawang, yang kemudian ditumbuhkan tetapi dia tidak mempunyai mandat dari konstituennya. Bisa jadi bicara sana sini, membuat program ini-itu. Apakah Anda pernah menyakan ke orang-orang kampung, apakah lembaga saya sudah benar apa belum; apakah program ini cocok atau tidak? Saya kira nyaris tidak ada. Jadi, kita kadang-kadang *jumawa*, sama sekali tidak rendah hati, merasa tahu. Seberapa jauh kita punya peta tentang apa sesungguhnya yang menjadi deritanya rakyat? Pernahkah kita mengetok rumah satu-satu, lalu bertanya mengenai kesehatan mereka? Ada *nggak* ibu-ibu yang mengalami osteoporosis di sini? Apa masalahnya? Berapa jam mereka bekerja? Kenapa bekerja 18 jam tetapi masih begini, tidak bisa mencapai kualitas hidup? Apa hubungannya dengan rusaknya alam dan lain sebagainya? Kita tidak terbiasa bertanya secara sistematis dan kemudian merumuskan permasalahan bersama. Jadi, siapa yang mustinya paling berperan, ya sebetulnya rakyat sendiri.

Filantropi mengandaikan sebuah model kerja yang sangat menarik. Sektornya membayangkan dirinya berada di luar rakyat; dia memberi. Jadi citra-diri rakyat dalam ontologi begini mirip dengan pasien yang ditandu, penuh dengan selang-selang penompang keselamatannya, dan filantropi memainkan peran di bagian transfusi. Nah, donor dalam hal ini kapitalisme atau *corporate sector* menjadi PMI-nya, sumber darahnya. Nomor satu, itu salah besar. Kemudian, hal itu juga penghinaan terhadap rakyat. Seolah-olah tanpa suntikan transfusi dan derma ini, dia tidak bisa berbuat. Saya kira filantropi yang cerdas, dia akan melihat, misalnya rakyat memberikan iurannya sendiri; seperti kita membayar SPP untuk belajar. Menurut saya itu akan menjadi sebuah model ekonomi solidaritas yang baru.

Sekarang, mari kita taruhkan, 10 tahun lagi seluruh dunia filantropi Indonesia, jika strategisnya masih seperti sekarang, krisis di seujur kepulauan bakal makin mendalam atau tidak? Saya melihat deforestasi tidak ketemu jawaban, gap antara sektor perbankan dan sektor riil, perbankan lebih banyak, sektor riil *megap-megap*. Seharusnya budget produksinya jelas, model konstruksinya seperti apa, tata guna sumber daya publiknya seperti apa, demikian pula dengan tata kuasanya. Proses belajarnya harus ada untuk mencapai keselamatan alam, produktivitas untuk mencapai kualitas hidup tercapai (tidak harus dengan bekerja 18 jam sehari). Jadi, dimensi keselamatan rakyat itu ada dua: (1) keselamatan manusia, (2) keamanan sosial. Itulah konteks dimana saya kira dunia filantropi akhirnya nanti harus memutuskan, mau belajar apa tidak. Kalau tidak, sektor ini akan dikenang-kenang dalam sejarah sebagai filantropi kurang-pikir, filantropi tanpa-guna, atau filantropi yang *agak* relevan.

## **Alternatif apa yang Mas tawarkan untuk minimal terlepas dari ketidaknyamanan ini?**

Ketidaknyamanan apa? Petugas-petugas filantropi itu anak-anak sekolah yang relatif adalah bagian dari *rulling class*, dia tidak menderita, dia bukan korban utama. Korban utamanya itu misalnya, *primary producer*, seperti petani, sektor informal di perkotaan, dan sebagainya. Itulah sesungguhnya korban utama. Apakah mereka diuntungkan oleh filantropi yang membesar dan sekarang sedang dibicarakan di mana-mana? Lihat saja sektor informal di Jakarta. Mereka digebukin, diusir-usir, dan segala macam. Itu dia! Mau *nggak* kita bicara tentang ITU dan menjawab apa masalah sesungguhnya di sini, bikin reformasi perkotaan yang ideal dan sebagainya. Dan ini bukan hanya soal jangka pendek. Bukan berarti filantropi ini sama-sekali tidak ada gunanya, justru pertanyaannya adalah ekonomi solidaritas apa yang hendak ditumbuhkan. Saya kira pertanyaan kuncinya itu. Kalau dibalik, solidaritas seperti apa yang bisa ditumbuhkan di masyarakat; di masyarakat-risiko seperti ini dengan kerusakan sosial ekonomis yang begitu mendalam? Modalitasnya seperti apa? Apakah

kerusakan cukup dibiarkan, yang penting memberi derma? Jelas hal ini tidak bisa diterima. Ini akan membingungkan orang karena mereka menganggap sudah cukup dengan memberi derma (kompensasi). Pertanyaan kuncinya, solidaritasnya mau ditaruh seperti apa? Apakah kita cukup bicara solidaritas dalam kubu masing-masing? Misalnya, yang Kristen ngurusi Kristennya, yang Islam ngurusi Islamnya, yang bagian ini ngurusi ininya, yang daerah ngurusi etnisitasnya sendiri; yang bukan orang Melayu nggak boleh, yang bukan ini nggak boleh. Saya kira sudah tidak cukup lagi sekarang, sebab kebutuhan solidaritas dan kolaborasinya sudah begitu besar dan rumit. Posisi kita masih didominasi oleh solidaritas terkecil seperti itu. Jadi pertanyaan paling utama adalah apa hubungan filantropi seperti yang kita kenal sekarang ini, dengan model solidaritas sosial yang harus betul-betul ditumbuhkan? Kedua, walaupun itu ada, agendanya apa? Apa yang harus diperbaiki; apa yang harus distop; apa yang harus dipelajari? Banyak sekali, jadi jangan merasa bahwa filantropi adalah sebuah dunia tersendiri dan kita dengan seenaknya bisa lenggang kangkung di dalamnya. Dia harus menjadi bagian dari pemecahan persoalan di sini. Saya kita itu titik sasarannya.